KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Puan minta semua ikut keputusan Ketum
Tanggal : Rabu, 02 November 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Puan Minta Semua Ikut Keputusan Ketum

NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi keputusan DPP PDIP memberikan sanksi kepada kelompok loyalisnya di DPR RI, yakni Dewan Kolonel. Menurutnya, semua orang boleh mendukung kader yang mempunyai kapabilitas, tetapi tetap tunduk terhadap keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Itu hanya dinamika di dalam internal partai intinya. PDI Perjuangan solid dan kami akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum," ujar Puan di Sport Center Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/11).

Puan berterima kasih kepada Dewan Kolonel yang menyosialisasikan dirinya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Namun, ia menilai, hal yang disosialisasikan adalah program yang berkaitan dengan dapil tersebut.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul juga menegaskan bahwa sanksi-sanksi tersebut tak menggangguu soliditas PDIP. Pihak yang menyebut partai berlambang kepala banteng itu pecah merupakan orang-orang yang tidak memahami PDIP.

"Karena PDI Perjuangan tergantung perintah ketua umum. Walaupun antara komandan lapangan pada bentrok, itu nanti balik perintah ketum lagi," kata Bambang.

Bambang yang sempat disebut sebagai jenderal dari Dewan Kolonel menjelaskan, sanksi yang diberikan organisasi kepada kader partai yang menyalahi aturan bersifat mengingatkan. "Untuk meluruskan kembali mekanismenya, juga ada diatur dalam ART partai dan peraturan partai," ujar dia.

Anggota Fraksi PDIP yang juga inisiator Dewan Kolonel, Johan Budi Sapto Pribowo, mempertanyakan sanksi itu karena kelompoknya tak melanggar apa pun. "(Surat sanksi teguran) sampai hari ini saya belum (terima), tapi pertanyaannya *kenapa* saya mesti dipanggil? Salah saya apa?" kata Johan.

Johan menegaskan, Dewan Kolonel bukan kelompok loyalis Puan yang dibentuk oleh DPP ataupun Fraksi PDIP. Kelompok tersebut hanya kumpulan anggota Fraksi PDIP yang secara pribadi menyosialisasikan Puan di dapil masing-masing.

Ia menegaskan, Dewan Kolonel juga bukan kelompok yang bertujuan untuk menyerang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, kelompoknya tetap mengikuti keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputra, termasuk hal-hal berkaitan dengan pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Namun, Johan menambahkan, Dewan Kolonel belum sempat beraktivitas, tetapi sudah tenggelam. "Belum aktif, sudah ramai, jadi *mendefep*," kata dia.

Johan juga tidak mempermasalahkan keputusan Fraksi PDIP DPR menggeser dia dari kursi Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ia menegaskan, pergeseran tersebut tak berkaitan dengan kehadiran Dewan Kolonel.

Sementara itu, Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer (Noel) menilai ada upaya adu domba dengan memunculkan isu bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi ketua umum PDIP apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden RI. "Saya yakin pelontar isu adalah pihak musuh. Maksud mereka, supaya Ganjar tidak dicalonkan PDI Perjuangan," kata dia.

Febrianto Adi Saputro **ed:** ratna puspita